

Kesadaran Publik di Indonesia: Survei Respons Publik Terhadap Korupsi dan Peran Akuntan

Hariman Bone*

* Universitas Mulawarman

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jl. Tanah Grogot No.1, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda 75117, Indonesia

E-mail: hariman.bone@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini mensurvei kesadaran dan persepsi publik terhadap korupsi di Indonesia, Negara yang dipandang oleh *Transparency International* memiliki level korupsi yang menurun. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei berbasis kuantitatif. Terdapat 528 responden yang berpartisipasi dalam survei ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi (83,52) dan ketidakstabilan politik merupakan isu utama di Indonesia. Lebih lanjut penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal kunci penyebab korupsi menurut responden adalah regulasi yang lemah dan ketidakefisienan birokrasi dengan persentase 71,59 dan 60,04%. Sedangkan faktor internal kunci adalah kepentingan personal dan penggunaan kekuasaan yang berlebihan masing-masing sebesar 59,09% dan 28,98%. Hasil ini memberikan masukan kepada pemegang kebijakan untuk mempertegas regulasi dan mengefisienkan birokrasi guna menekan kepentingan personal dan menghambat pertumbuhan korupsi. Terakhir, responden lebih percaya pada lembaga pendukung penegak hukum (PPATK, BPK dan BPKP) daripada penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Polri dan MA).

Kata kunci: Korupsi, Persepsi, Kesadaran Publik, Peran Akuntan

Abstract

The purpose of this paper is to examine public awareness and perceptions on corruption in Indonesia, a country that according to Transparency International - The Global Anti-Corruption Coalition has been viewed as having relatively declining levels of corruption. This study used online survey-based-quantitative approach. 528 respondents participated in this survey. The results showed that corruption (83.52) and political instability were the main issues in Indonesia. Furthermore, the main factors causing corruption are weak regulation and bureaucratic ineffectiveness. Finally, respondents believe more in supporting law enforcement agencies (PPATK, BPK and BPKP) than law enforcement (KPK, Attorney General, National Police and MA). The findings presented in this study contradict the results of International Transparency which shows corruption in Indonesia is decreasing, whereas according to the majority of respondents agree corruption is actually increasing in Indonesia.

Keywords: Corruption, perceptions, public awareness, Accountant Role

1. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah akut dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Beberapa kasus besar seperti; kasus Jiwasraya (kerugian Rp13,7 T), Bank Century (kerugian Rp7 T), Pelindo (kerugian Rp6 T), Kotawaringin Timur (Kerugian Rp5,6 T), BLBI (kerugian Rp5,58 T), E-KTP (kerugian Rp2,3 T), dan Hambalang (kerugian Rp706 M) menunjukkan jumlah kerugian negara yang sangat signifikan (Tamtomo, 2020).

Kecenderungan korupsi yang meningkat juga ditunjukkan oleh data KPK yang dirilis tahun 2019. Data KPK menunjukkan bahwa terjadi peningkatan korupsi yang signifikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 terdapat 121 kasus penyidikan yang ditangani oleh KPK dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 199 kasus (Statistik *Anti-Clearing Corruption House*, 2018). Lebih lanjut, level korupsi Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara dalam skala global. Data-data tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan korupsi di

Indonesia masih kurang efektif.

Masifnya Korupsi di Indonesia tidak diiringi dengan peningkatan perilaku anti korupsi pada masyarakat. Indeks perilaku anti korupsi yang dirilis BPS menggunakan skala 0-5 (mendekati 5 berarti semakin tinggi perilaku anti korupsi) menunjukkan penurunan dari 3,71 menurun menjadi 3,66. Artinya perilaku anti korupsi masyarakat semakin menurun, dengan kata lain masyarakat semakin permisif terhadap korupsi (BPS, 2018). Fenomena ini perlu untuk diteliti secara mendalam apakah kesadaran masyarakat terhadap praktik korupsi yang rendah atau kesadaran masyarakat tinggi akan tetapi mereka menjadi permisif karena tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyurvei kesadaran publik terhadap korupsi, Institusi mana saja yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, faktor apa yang mendorong untuk melakukan korupsi dan bagaimana peran akuntan dalam menghadapi permasalahan tersebut?

Penelitian ini menggunakan survei yang disebar secara elektronik kepada publik terkait persepsi mereka terhadap korupsi. Hasil Survei menunjukkan bahwa 80% lebih responden menyatakan bahwa korupsi merupakan permasalahan utama di Indonesia. Persepsi responden terhadap instansi yang riskan terhadap korupsi adalah DPR. Penyebab utama korupsi adalah buruknya aturan perundang-undangan dan ketidakefektifan dan ketidakefisienan birokrasi.

Penelitian ini berkontribusi pada beberapa aspek; pertama, untuk memberikan gambaran tentang persepsi kesadaran publik terhadap korupsi. Survei ini menjadi masukan bagi pemangku kepentingan bahwa masalah korupsi lebih utama bagi publik dibandingkan masalah-masalah lainnya (ketidakstabilan politik, pengangguran, kemiskinan dll). Kedua, menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa penyebab utama korupsi adalah faktor eksternal dari seseorang seperti peraturan perundang-undangan yang buruk dan ketidakefektifan birokrasi.

Pembahasan penelitian ini terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama membahas tentang pendahuluan. Bagian kedua mendiskusikan telaah literatur yang mendasari pembahasan diskusi ini. Bagian ketiga dan keempat membahas tentang metodologi dan pembahasan. Terakhir, penelitian ini ditutup dengan kesimpulan

2. Literatur Review

Korupsi menurut Vito Tanzi dalam Begovic (2005) adalah ketidakpatuhan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip yang berterima umum yang bertujuan untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang yang lain yang memiliki hubungan dengannya. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 mendefinisikan

“korupsi sebagai setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakannya. Korupsi secara umum dipandang sebagai salah satu hambatan utama dalam pengembangan sistem pemerintahan yang efisien karena terdapat gejala bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan negara (Asongu 2013).

Penelitian-penelitian berbentuk survei telah dilakukan di beberapa negara lainnya. Di antaranya, Budak (2007) melakukan survei korupsi di negara Kroasia. Dia menunjukkan bahwa institusi terkorup adalah pemerintah lokal, kota dan kecamatan. Survei selanjutnya menunjukkan bahwa institusi hukum merupakan institusi terkorup pada tahun 2005. Dia juga menunjukkan bahwa korupsi merupakan penghambat utama bisnis dan pembangunan.

Graycar (2014) melakukan survei terkait korupsi di Viktoria. Hasil survei menunjukkan bahwa warga Viktoria menganggap bahwa institusi terkorup adalah serikat buruh, media dan partai politik. Lebih lanjut, dia menunjukkan bahwa bentuk korupsi yang diduga banyak terjadi adalah memasukkan teman untuk bekerja, konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi.

Survei lainnya dilakukan oleh Bowman dan Gilligan (2007) di Australia. Mereka menunjukkan bahwa korupsi bukan merupakan isu utama di Australia. Korupsi menempati urutan kelima sebagai isu nasional di Australia. Lima puluh persen lebih responden menyatakan bahwa institusi yang korup adalah kepolisian. Penyebab korupsi tertinggi adalah karena kepentingan personal.

Termotivasi survei-survei dari beberapa negara lainnya, penelitian ini melakukan survei di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka teori *power* dan artikel yang ditulis oleh (Begovic 2005) terkait penyebab korupsi. *Power* adalah kemampuan relatif individu untuk memengaruhi keadaan orang lain dengan cara memberikan atau menarik sumber daya atau memberikan hukuman (Keltner et al. 2003). Secara tradisional *power* fokus bagaimana seseorang mengendalikan hasil dan sumber daya yang dikuasainya. Definisi ini merujuk pada *power* sebagai kekuasaan individu, bukan kekuasaan sosial (Wang dan Sun 2016). Kekuasaan yang bersifat individu mengarahkan pada perilaku penyalahgunaan seperti korupsi.

Begovic (2005) menjelaskan bahwa korupsi adalah faktor personal individu yang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan manfaat pribadinya. Individu merupakan agen rasional yang bertujuan untuk memakmurkan keadaan pribadinya. Keadaan tersebut didukung dengan regulasi yang buruk. Sifat individu dan regulasi yang melingkupinya merupakan penyebab terjadinya korupsi.

Terakhir, Penelitian ini menambahkan *Diamond fraud theory* sebagai penjelasan temuan survei yang dilakukan. Walaupun secara bahasa *fraud* dan korupsi memiliki perbedaan namun mekanisme penyebab korupsi juga dapat dijelaskan dengan penyebab *fraud* dalam teori tersebut.

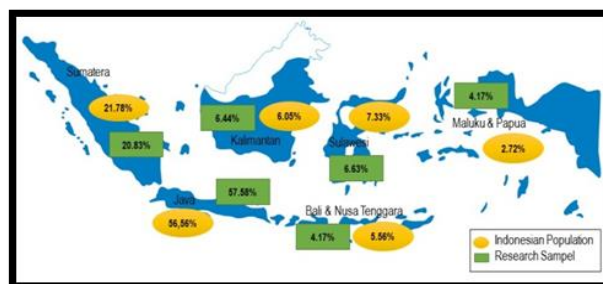
3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey berbasis kuantitatif. Kuisiонер yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari Researchwise (Bowman dan Gilligan 2007) dengan beberapa modifikasi. Modifikasi terutama dilakukan untuk menyesuaikan instrumen tersebut dengan konteks di Indonesia. Kuisiонер tersebut didistribusikan melalui survei online ke para responden. Populasi dalam penelitian ini adalah Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan random sampling.

4. Hasil dan Pembahasan

Gambar 1 menunjukkan penyebaran 528 responden berdasarkan Daerah. Jika diperhatikan bahwa persentase responden tiap daerah hampir menyerupai penyebaran populasi di tiap daerah di Indonesia. Jumlah responden terbanyak berasal dari Pulau Jawa yaitu sebesar 57,58% dan ini menyerupai jumlah populasi yang ada di Pulau Jawa yaitu sebesar 56,56%. Perolehan responden terkecil berasal dari pulau Papua dan Maluku yaitu sebesar 4,17%, nilai tersebut secara persentase lebih besar dari persentase penduduk Indonesia yang berada pada ke dua pulau tersebut. Walaupun secara jumlah, responden yang diperoleh dalam penelitian ini relatif kecil, akan tetapi distribusinya pada tiap daerah dapat diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa responden diperoleh secara merata hampir di setiap daerah.

Tabel 1 menunjukkan profil demografi responden yang digunakan dalam penelitian ini. 60,42% adalah responden wanita dan sisanya 39,58% adalah pria. Kebanyakan responden bekerja sebagai mahasiswa, aparatur sipil negara dan karyawan swasta masing-masing sebesar 35,42%, 26,70%, dan 21,40. Mayoritas umur responden berkisar 26-45 tahun sebanyak 64,02%.



Gambar 1. Populasi Indonesia dan distribusi sampel penelitian.

TABEL 1.

Karakteristik	PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN	
	Semua Responden	
	N	%
Jenis kelamin		
Laki laki	209	39.58
Perempuan	319	60.42
Pekerjaan		
Mahasiswa	187	35.42
Ibu Rumah tangga	29	5.49
ASN	141	26.70
Karyawan BUMN	9	1.70
Karyawan swasta	113	21.40
Wirasahawan	22	4.17
Tidak Bekerja	12	2.27
Lain-lain	15	2.84
Umur		
17-25	159	30.11
26-45	338	64.02
46-65	30	5.68
>65	1	0.19
Level Pendidikan		
SD-SMU	39	7.39
D3	5	0.95
S1	286	54.17
S2	178	33.71
S3	20	3.79

Apa itu Korupsi?

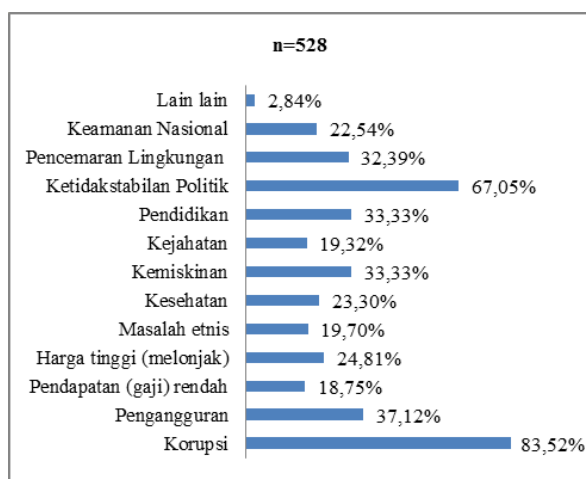
Tabel 2 menunjukkan persepsi responden terhadap aktivitas-aktivitas yang mereka anggap korupsi. Responden menjawab bahwa menerima suap memiliki skor rata-rata tertinggi sebesar 3,83. Membayar kas ilegal untuk mengurangi pajak memperoleh nilai rata-rata tertinggi kedua dengan skor 3,82. Menyogok hakim untuk mempengaruhi hasil berada di urutan ketiga dengan skor rata-rata 3,79. Merujuk definisi korupsi dalam undang-undang yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka para responden mayoritas sadar akan aktivitas-aktivitas korupsi.

TABEL 2.

Respons	Rerata
Individu atau organisasi memberikan sumbangan besar kepada partai politik	2.61
Pejabat pemerintah menerima hadiah	3.16
Organisasi yang mensponsori inisiatif/program pemerintah	2.30
Pelaporan media yang bias terhadap politik dan partai politik	2.62

Menunjuk teman Anda untuk sebuah pekerjaan di pemerintahan dan institusi	2.74
Meminta direktur eksekutif untuk mempekerjakan kerabat Anda	3.12
Hadiah untuk dokter yang merawat Anda	1.98
Membayar pejabat pengadilan untuk memengaruhi hasil suatu kasus sesuai keinginan Anda	3.79
Menerima pembayaran tunai "di bawah meja" dalam bisnis atau kantor untuk mengurangi kewajiban pajak Anda	3.82
Menggunakan posisi resmi untuk menjalankan bisnis pribadi	3.51
Menerima suap untuk tidak melakukan tugas resmi Anda	3.83
Profesional yang menawarkan "harga teman" untuk teman dan rekan	2.88

Catatan: 1_ Tidak tahu; 2_ jelas bukan korupsi; 3_ Mungkin korupsi; 4_ Jelas korupsi



Gambar 2. Masalah utama di Indonesia

Penelitian ini mengangkat isu utama tentang bagaimana kesadaran publik terhadap korupsi. Pertanyaan pertama yang dieksplorasi adalah mengenai isu-isu penting di Indonesia. Penelitian ini mempertanyakan isu penting apa yang paling krusial di Indonesia. Responden diberikan beberapa daftar persoalan yang sering terjadi dan diminta untuk menuliskan apa saja masalah utama yang menurut mereka penting.

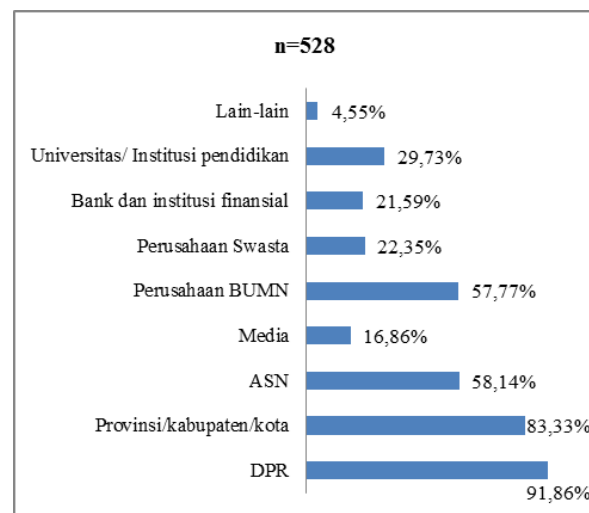
Gambar 2 menunjukkan bahwa 83,53% responden menyatakan bahwa persoalan utama di Indonesia adalah korupsi. Persoalan ketidakstabilan politik, pengangguran, kemiskinan, pendidikan, polusi lingkungan masing-masing menempati posisi kedua dan seterusnya. 2,84% responden memberikan jawaban sendiri terkait isu utama di Indonesia yaitu; pemerataan pembangunan, intoleransi, radikalisme, gangguan ideologi. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden bersepakat bahwa korupsi merupakan isu utama di negara Indonesia. Isu ini bahkan melampaui isu-isu penting lainnya seperti; kemiskinan, pengangguran dan ketidakstabilan politik.

Persepsi Responden terhadap tempat korupsi

Isu selanjutnya yang didiskusikan dalam penelitian ini adalah institusi apa menurut responden yang berhubungan dengan korupsi. Gambar 3 menunjukkan

jawaban responden atas organisasi mana yang berhubungan erat dengan korupsi. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden (91,86%) menjawab bahwa DPR merupakan organisasi yang lebih korup dibandingkan dengan kepala daerah dan ASN secara umum. Persepsi responden ini sejalan dengan temuan KPK pada tahun 2018 dari 260 kasus korupsi 103 diantaranya dilakukan oleh DPR dan DPRD (Garnesia 2019).

Penelitian terdahulu telah menunjukkan kecenderungan korupsi pada legislatif. Yadav (2012) menjelaskan bahwa legislatif yang memberikan kontrol kepada partai politik tentang penentuan agenda-agenda pembangunan cenderung untuk meningkatkan korupsi. Abdullah dan Asmara (2006) menemukan bahwa legislatif berperilaku oportunistik dalam hal pengalokasian belanja dengan merekomendasikan eksekutif untuk meningkatkan belanja-belanja pada sektor yang mendukung kepentingannya.



Gambar 3. Respons responden terhadap korupsi pada setiap institusi

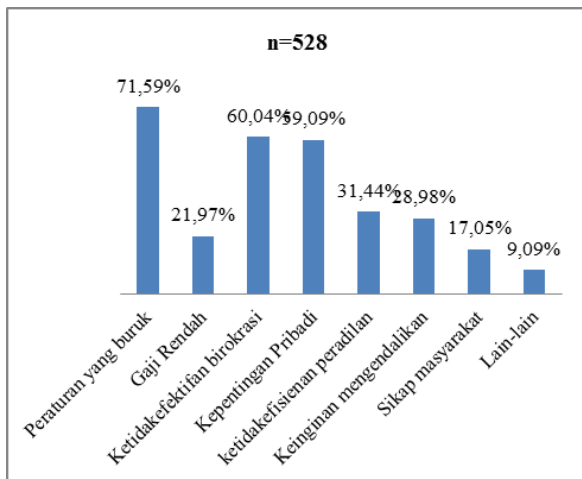
Faktor yang mempengaruhi korupsi

Penelitian ini mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi korupsi menurut persepsi responden. Gambar 4 menunjukkan jawaban responden terkait faktor yang mempengaruhi korupsi. Dari sudut pandang sistem tata kelola, responden menunjukkan bahwa peraturan yang buruk, ketidakefektifan birokrasi dan ketidakefisienan sistem hukum bersumbangsi besar pada perilaku korupsi. Peraturan perundangan yang buruk menempati urutan pertama yaitu 71,59%, ketidakefektifan birokrasi di urutan kedua sebesar 60,04% dan ketidakefisienan sistem hukum di urutan keempat sebesar 31,44%.

Dari sudut pandang personal terdapat tiga faktor yang mempengaruhi korupsi yaitu kepentingan personal, penggunaan kekuasaan yang berlebihan dan gaji yang rendah. Faktor kepentingan personal sebesar 59,09%

berada di urutan ketiga, penggunaan kekuasaan yang berlebihan sebesar 28,98% di urutan kelima dan gaji yang rendah berada di urutan keenam dengan besaran 21,97%. 9,09% responden menjawab penyebab lain yang mempengaruhi korupsi, diantaranya; kurangnya pendidikan etika dan moral, karakter yang tamak, sistem politik, kesenjangan ekonomi dan *leadership*. Terakhir 17,05% responden menyatakan bahwa penyebab korupsi adalah sikap warga Indonesia.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan banyak penelitian-penelitian terdahulu. Begovic (2005) menguraikan bahwa penyebab dasar korupsi adalah motif ekonomi dan regulasi pemerintah. Regulasi yang buruk memicu individu untuk memanfaatkan kelemahan regulasi tersebut untuk memaksimalkan kepentingannya. Motif ekonomi mewakili sudut pandang personal sedangkan regulasi mewakili sudut pandang tata kelola sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.



Gambar 4. Faktor yang mempengaruhi korupsi

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa budaya dan sikap mempengaruhi korupsi. Para peneliti terdahulu menunjukkan bahwa individu dengan *power distance* yang tinggi meningkatkan kecenderungan untuk melakukan korupsi (Valdovinos et al. 2019; Husted 1999; Getz dan Volkema 2001).

Faktor penyebab korupsi dapat dianalisis juga menggunakan kerangka *fraud diamond theory* (Wolfe dan Hermanson 2004; Mansor 2015). Teori tersebut menyatakan bahwa *fraud* dapat disebabkan oleh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas. Kapabilitas merupakan perluasan dari teori sebelumnya.

Faktor pertama adalah tekanan. Tekanan dalam penelitian ini diwakili oleh kepentingan personal. Faktor kedua adalah kesempatan. Kesempatan tercipta karena ketidakefektifan sistem pengendalian dan tata kelola yang memungkinkan seseorang untuk

mengambil keuntungan atas keadaan tersebut (Mansor 2015). Dalam penelitian ini kesempatan dapat diciptakan melalui regulasi yang buruk, ketidakefektifan dan inefisiensi birokrasi dan sistem hukum.

Faktor ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan proses justifikasi atas perilaku korupsi seseorang (Wolfe dan Hermanson 2004). Proses justifikasi ini semakin mudah jika didukung oleh lingkungan. Dalam penelitian ini sikap dan budaya permisif yang meluas terhadap korupsi dapat meningkatkan perilaku tersebut. Faktor yang keempat adalah kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan, karakter atau *skill* yang memungkinkan seseorang untuk melakukan *fraud* (Wolfe dan Hermanson 2004). Salah satu prasyarat untuk menggunakan kapabilitas adalah *position* (Mansor 2015), yang mana dalam penelitian ini terwakili oleh kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan pengendalian.

Peran Akuntan

Tabel 3 menunjukkan alat untuk mencegah dan mendeteksi korupsi. Mayoritas responden menjawab bahwa audit internal (93,40%), pengendalian internal (92,39%) dan audit eksternal (88,83%) merupakan alat untuk mencegah dan mendeteksi korupsi. Hasil ini menunjukkan bahwa responden memberikan kepercayaan tinggi terhadap akuntan untuk persoalan korupsi. Peran besar akuntan yaitu dengan meningkatkan profesionalisme dan independensi untuk mencegah dan mendeteksi korupsi yang akan terjadi. Peran akuntan dapat diwujudkan dalam bidang pemeriksaan baik internal maupun eksternal.

TABEL 3.

ALAT UNTUK MENCEGAH KORUPSI

Alat untuk mencegah korupsi	(%)
Audit Internal	93,40
Pengendalian Internal	92,39
Audit Eksternal	88,83
Sistem Informasi Manajemen	83,76
Pemberitahuan (karyawan, pelanggan, Suplier atau sumber rahasia)	81,73
Sistem penilaian fraud	80,71
Management risiko fraud	80,71
Pengendalian IT	73,10

Hasil survei kepercayaan publik terhadap institusi yang berhubungan dengan pencegahan dan pendeteksian korupsi menunjukkan bahwa KPK dan BPK dan PPAK merupakan institusi yang paling dipercaya dalam mengawal korupsi.

TABEL 4.

KEPERCAYAAN PUBLIK

Institusi	Rerata
Komisi Pemberantasan Korupsi	4.94
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	3.58
Kejaksaan	3.97
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	4.41
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	4.40

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mensurvei kesadaran dan persepsi publik terhadap korupsi pada masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas publik menganggap bahwa korupsi merupakan isu utama di Negara Indonesia. Responden juga mampu memahami dan menyadari bentuk atau aktivitas-aktivitas korupsi yang terjadi.

Terkait penyebab korupsi, penelitian ini membagiannya menjadi dua sumber yaitu internal dan eksternal individu. Para responden menyatakan sumber internal, seperti kepentingan personal, penggunaan kekuasaan yang berlebihan serta gaji yang rendah merupakan penyebab korupsi di Indonesia.

Sumber eksternal seperti peraturan perundang-undangan yang buruk, ketidakefektifan birokrasi menjadi penyebab utama yang memberikan kesempatan kepada individu untuk melakukan korupsi. Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan responden terhadap akuntan sebagai penjaga perilaku korupsi sangat tinggi baik dalam bentuk audit internal, Pengendalian internal maupun audit eksternal.

Penelitian ini berimplikasi penting bagi pemerintah. Penelitian ini sebagai informasi tentang bagaimana pandangan publik terhadap korupsi. Pemerintah perlu untuk membangun sistem regulasi yang kuat, mengefisienkan birokrasi dan sistem hukum di Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah perlu untuk memperkuat institusi-institusi pemeriksa sehingga kepercayaan publik terhadap institusi-institusi tersebut semakin meningkat.

Penelitian ini harus dipandang dalam batasan yang melingkupinya. Penelitian ini bersifat survei deskriptif, sehingga hanya berisi informasi persepsi publik atas permasalahan korupsi. Jumlah responden sangat sedikit jika dibandingkan dengan populasinya. Akan tetapi upaya mendistribusi untuk setiap daerah telah dilakukan.

Daftar Pustaka

A. Abdullah, S., dan J. A. Asmara. 2006. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah. Simposium Nasional Akuntansi 9:23-26.

B. Asongu, S. A. 2013. Fighting Corruption in Africa: Do Existing Corruption-control Levels Matter? *International Journal of Development Issues* 12 (1):36-52.

C. Begovic, B. 2005. Corruption: concepts, types, causes and consequences. Center for Liberal-Democratic Studies, Year III No 26.

D. Bowman, D., dan G. Gilligan. 2007. Public awareness of corruption in Australia. *Journal of Financial Crime*.

E. BPS 2018. Indeks perilaku anti korupsi tahun 2018. <https://www.bps.go.id/website/images/Indeks-Perilaku-Anti-Korupsi-2018-ind.jpg>.

F. Budak, J. 2007. Corruption in Croatia: Perceptions rise, problems remain. *Croatian Economic Survey* (9):35-68.

G. Garnesia, Irma., (2019). Kasus Korupsi: 2018 Terbanyak, Anggota DPR & DPRD Paling Korup. <https://tirto.id/kasus-korupsi-2018-terbanyak-anggota-dpr-dprd-paling-korup-ejTv>. 19/02/2019. Akses Pukul 10.25.

H. Getz, K. A., and R. J. Volkema. 2001. Culture, perceived corruption, and economics: A model of predictors and outcomes. *Business & society* 40 (1):7-30.

I. Graycar, A. 2014. Awareness of corruption in the community and public service: A Victorian study. *Australian Journal of Public Administration* 73 (2):271-281.

J. Husted, B. W. 1999. Wealth, culture, and corruption. *Journal of international business studies* 30 (2):339-359.

K. Keltner, D., D. H. Gruenfeld, and C. Anderson. 2003. Power, approach, and inhibition. *Psychological review* 110 (2):265.

L. Mansor, N. 2015. Fraud triangle theory and fraud diamond theory. Understanding the convergent and divergent for future research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science* 1:38-45.

M. Statistik Anti-Corruption Clearing House. (2018). Penindakan. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>. 12/02/2020, akses jam 13.47.

N. Tamtomo, Akbar, Bhayu., (2020). INFOGRAFIK: 7 Kasus Korupsi dengan Kerugian Terbesar di Indonesia. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/090500465/infografik-7-kasus-korupsi-dengan-kerugian-terbesar-di-indonesia>.

O. Valdovinos, I. A., M. Szymanski, and K. Grabowska. 2019. Revisiting corruption and culture—are there really cultures more prone to corruption? Paper read at Forum Scientiae

Oeconomia.

- P. Wang, F., and X. Sun. 2016. Absolute power leads to absolute corruption? Impact of power on corruption depending on the concepts of power one holds. *European Journal of Social Psychology* 46 (1):77-89.
- Q. Wolfe, D. T., and D. R. Hermanson. 2004. The fraud diamond: Considering the four elements of fraud.
- R. Yadav, V. 2012. Legislative institutions and corruption in developing country democracies. *Comparative Political Studies* 45 (8):1027-1058.